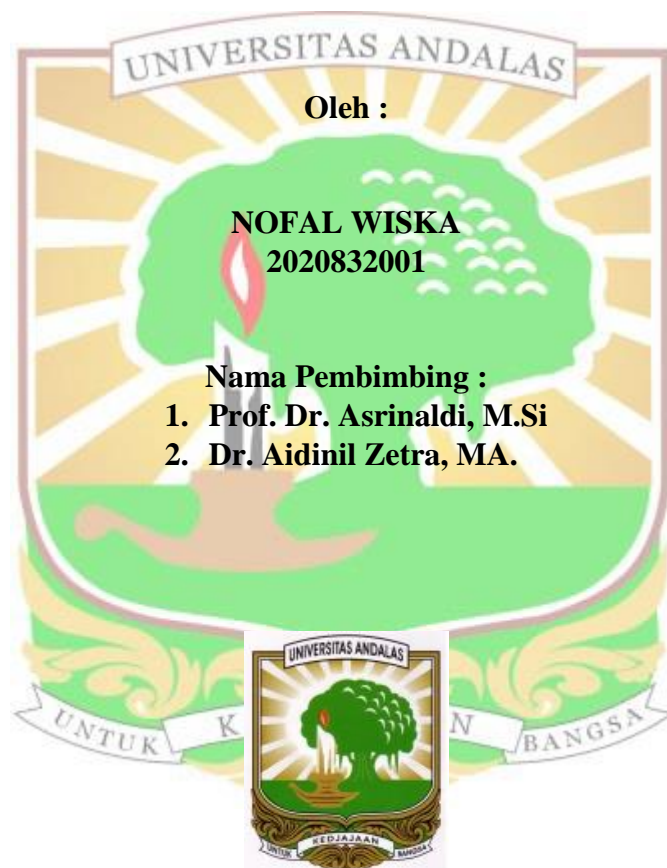


**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK:
STUDI KASUS DI KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN KOTA
PADANG**

TESIS



Oleh :

**NOFAL WISKA
2020832001**

Nama Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si**
- 2. Dr. Aidinil Zetra, MA.**

**MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
TAHUN
2023**

ABSTRAK

Nama : Nofal Wiska
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik, Studi Kasus Di Kota Padang Dan Kabupaten Pesisir Selatan

Titik lemah dari implementasi keterbukaan informasi publik, berada di kebijakan pemerintah dan kepala daerah. Khusus kepala daerah memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan regulasi, politik anggaran yang pro dengan pengembangan sistem dan budaya keterbukaan dan strategi dalam menggerakkan stakeholders untuk keterbukaan informasi publik. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam melihat kebijakan kepala daerah sebagai *political will* di Pesisir Selatan dan Kota Padang dilihat dari (a) aspek regulasi dan perangkat keputusan yang dibuat merupakan titik tolak bagaimana sebuah kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik, (b) pemahaman yang sama pada agenda formal, sehingga masalah yang muncul menjadi masalah publik untuk diagendakan menjadi kebijakan publik. (c) Insentif dan disinsentif pendukung terkait dengan kepatuhan implementator dalam menerapkan kebijakan publik dan (d) bagaimana kepala daerah mengorkestrasi komitmen bersama melalui pendanaan dan sanksi dan penerapan kebijakan, mekanisme penegakan hukum disertai sanksi yang jelas, serta ada dukungan dari pelaksana kebijakan atau birokrat. Pesisir Selatan menjalankan empat aspek tersebut sehingga memunculkan *political will* kepala daerah dalam mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik di level birokrasi. Hal ini berbanding terbalik dengan Kota Padang yang belum memiliki sistem layanan informasi memadai, karena tidak ada *political will* kepala daerah. Keberhasilan Pesisir Selatan melaksanakan kebijakan KIP ini tidak terlepas dari *Commitment of political leaders, Organizational capacity, The Commitment of implementers* dan *Support from interest group*. Sedangkan kegagalan Pemko Padang dalam menerapkan KIP dihambat oleh faktor banyaknya ‘pemain’ (aktors) yang terlibat, komitmen atau loyalitas ganda, Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri, jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak dan perubahan kepemimpinan.

Kata Kunci : *political will*, Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik

ABSTRACT

Name : Nofal Wiska
Study Program : Master of Political Science
Title : Local Government Policy in Implementing Public
Information Disclosure, Case Studies in Padang City
and Pesisir Selatan District

The weak point of the implementation of public information disclosure is in the policies of regional heads. Regional heads have authority in terms of issuing regulations, pro-budgetary politics with system development and a culture of openness and strategies in mobilizing stakeholders for public information disclosure. The purpose of this study is to explain and analyze the policies of regional heads in *Pesisir Selatan* Regency and *Padang* City in implementing public information disclosure. This study uses a qualitative approach with a case study research type. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation methods. From the results of this study, researchers found that in viewing regional head policies as political will in *Pesisir Selatan* and *Padang* City seen from (a) the regulatory aspects and the decision tools made are the starting point for how a policy can be implemented properly, (b) a good understanding the same on the formal agenda, so that problems that arise become public issues to be scheduled to become public policies. (c) Supporting incentives and disincentives related to implementer compliance in implementing public policies and (d) how regional heads orchestrate shared commitments through funding and sanctions and implementation of policies, law enforcement mechanisms accompanied by clear sanctions, and support from policy implementers or bureaucrats. *Pesisir Selatan* carries out these four aspects so as to bring out the political will of regional heads in supporting public information disclosure policies at the bureaucratic level. This is inversely proportional to the City of *Padang* which does not yet have an adequate information service system, because there is no political will from the regional head. The success of *Pesisir Selatan* in implementing the KIP policy is inseparable from the commitment of political leaders, organizational capacity, the commitment of implementers and support from interest groups. Whereas the failure of *Pemko Padang* in implementing KIP was hampered by the factors of the large number of 'players' (actors) involved, multiple commitments or loyalties, the complexity inherent in the project itself, too many levels of decision making and changes in leadership.

Keywords: *Political Will, Policy, Public Information Disclosure*

